



PENGARUH PROFESIONALISME DAN INDEPENDENSI TERHADAP KINERJA AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH DIMEDIASI OLEH PEMAHAMAN TERHADAP GOOD GOVERNANCE

(Studi Pada Inspektorat Provinsi Riau)

Sri Wahyuni Zanra ^{a*}, Yuyu Kusdiana^b

^a Program Studi Akuntansi, sriwahyunizanra@stie-mahaputra-riau.ac.id, STIE Mahaputra Riau

^b Program Studi Manajemen, yayukusdiana@stie-mahaputra-riau.ac.id, STIE Mahaputra Riau

* korespondensi

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of professionalism and independence on the performance of government internal auditors mediated by an understanding of good governance at the Riau Provincial Inspectorate. The research method used is quantitative research. The population in this study were all internal auditors at the Riau Provincial Inspectorate totaling 52 people. The data collection technique used was a structured questionnaire. The instrument testing technique in this study was the validity and reliability test using PLS (Partial Least Square) as its measurement. The results of this study indicate that professionalism and independence have a significant direct effect on the performance of internal auditors at the Riau Provincial Inspectorate. Likewise, an understanding of Good Governance is able to mediate the relationship between professionalism and independence and the performance of internal auditors at the Riau Provincial Inspectorate

Keywords: professionalism, independence, understanding of good governance, auditor performance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui pengaruh profesionalisme, dan independensi terhadap kinerja auditor internal pemerintah dimediasi oleh pemahaman terhadap good governance Pada Inspektorat Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau yang berjumlah 52 orang.. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Teknik pengujian instrumen dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan PLS (Partial Least Square) sebagai pengukurannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalitas dan independensi berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau. Demikian juga *pemahaman akan Good Governance* mampu memediasi hubungan antara profesionalitas dan independensi dan kinerja auditor . internal pada Inspektorat Provinsi Riau

Kata Kunci: profesionalisme, independensi , pemahaman terhadap good governance, kinerja auditor

1. PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada suatu instansi pemerintah, maka diperlukan adanya pengawasan kinerja internal pemerintah yang baik secara efektif dan efisien. Dengan adanya pengawasan internal ini, dapat diketahui sejauh mana suatu instansi pemerintah telah melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan kinerja yang memiliki akuntabilitas, pemerintahan yang bersih, berwibawa dan berdaya saing maka diperlukan pengawasan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Kinerja auditor internal merupakan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian program pelaksanaan internal auditing dalam suatu lembaga atau perusahaan untuk mewujudkan tujuan dan

sasaran perencanaan organisasi. Auditor internal pemerintah memiliki tanggung jawab dari suatu pencapaian hasil kinerja auditor tersebut. Auditor internal pemerintah sebagai seseorang yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menilai suatu kewajaran atas laporan keuangan pemerintah serta mengevaluasi dan meningkatkan kinerjanya. Peran auditor internal pemerintah juga sangat besar dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi sehingga dapat menciptakan suatu tata kelola pemerintah yang baik.

Fenomena yang sering terjadi pada era globalisasi ini adalah maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) terhadap petinggi daerah di Indonesia. Sedangkan banyak harapan masyarakat agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan bersih dari praktik KKN. Hal ini memang wajar karena terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (bad governance) dan buruknya birokrasi. Fenomena KKN ini sudah sangat umum terjadi tidak lepas dari petinggi daerah itu sendiri.

Seperti yang dikemukakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat 444 korupsi dengan jumlah tersangka 875 orang serta kerugian negara mencapai Rp 18,6 triliun. Sedangkan pada tahun 2021 pada periode semester satu terdapat kasus korupsi sebanyak Rp 26,83 triliun. Menurut ICW, hal ini disebabkan lantaran pengawasan pengelolaan anggaran untuk penanganan kasus korupsi oleh pemerintah semakin buruk [1].

Tahun 2020 ada 27 perkara tindak pidana korupsi di provinsi Riau seperti korupsi pengadaan barang dan jasa, laporan fiktif, serta dana hibah dan suap. Meningkatnya kasus korupsi di Provinsi Riau juga sejalan dengan bertambahnya jumlah uang korupsi dan kerugian negara. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya pengawasan dan pengendalian internal pemerintah daerah yang dilakukan oleh Inspektorat. Seperti kasus gratifikasi yang dilakukan tim auditor Inspektorat Riau. Gratifikasi di duga diberikan kepada tim auditor Inspektorat Provinsi Riau yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan BUMD. Seharusnya auditor di Inspektorat Riau bebas dari praktik culas tersebut dan seharusnya peran Inspektorat mestinya telah menyadari dan paham tentang gratifikasi dalam jabatan sehingga tidak melakukan hal tersebut dalam praktiknya [2].

Berdasarkan banyaknya temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Riau menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah provinsi Riau saat ini sangat kacau. Pada data LHP BPK Riau tahun 2020, ditemukannya kerugian sebesar 91 miliar lebih APBD yang terdiri dari temuan berpotensi kerugian negara sebesar Rp 81.6 miliar, kekurangan penerimaan negara dan daerah sebesar Rp 1.9 miliar, dan terjadinya penyimpangan administrasi sebesar Rp 7.6 miliar. Diketahui temuan LHP Provinsi Riau ini meningkat tajam dibandingkan dengan laporan tahun 2019 yang hanya berada di angka Rp 27 miliar rupiah [3]

Pada temuan tersebut dapat menunjukkan bahwa kasus korupsi yang sering terjadi di Provinsi Riau terus meningkat sehingga peran auditor internal (inspektorat) pemerintah sebagai pengawas dan pemeriksa penggunaan APBD tidak berjalan semestinya padahal Undang-Undang telah mengamanatkan kepada Inspektorat untuk mengawasi penggunaan keuangan negara berupa APBD tersebut. Seharusnya peran Inspektorat Provinsi Riau dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk mengawasi bagaimana kinerja pejabat baik dalam menjalankan program dan kegiatan serta perannya sebagai institusi yang mengawasi jalannya pembangunan yang menggunakan dana APBD dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyimpangan lainnya.

Dari fenomena dan kasus di atas, seharusnya tugas auditor internal membantu pemerintah memberikan rekomendasi yang baik untuk hasil yang baik dalam melaporkan keuangannya. Sehingga pelaporan yang baik akan mencerminkan berhasilnya realisasi anggaran yang telah dilakukan sektor pemerintahan tersebut dan juga menggambarkan bahwa audit internal yang dilakukan dalam pengawasan dana APBD telah dilaksanakan dengan baik. Sebaliknya, apabila pelaporan yang diberikan buruk, maka akan berdampak pada lemahnya pengawasan yang dilakukan audit internal pemerintah karena tidak bisa mengawasi pemanfaatan dana APBD sebagaimana yang telah di rencanakan.

Hal ini membuktikan bahwa kinerja auditor internal pemerintah inspektorat Provinsi Riau masih memiliki kekurangan dan perlu melakukan perbaikan khususnya pada profesionalisme, independensi dan pemahaman good governance yang masih tidak maksimal dan belum efektif. Tugas auditor internal

pemerintah seharusnya membantu pemerintah untuk memberikan rekomendasi hasil laporan keuangan pemerintah yang baik dan berkualitas.

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja auditor internal pemerintah, salah satunya adalah profesionalisme. Profesionalisme auditor merupakan kepemilikan sikap kesungguhan dan penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menjalankan profesinya untuk mencapai kinerja tugas yang telah di atur oleh organisasi profesi (Marita dan Gultom, 2018). Dalam melaksanakan audit, auditor harus profesional dan berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Syarat utama yang harus dimiliki oleh auditor internal pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya adalah dengan mempertahankan sifat profesionalisme.

Independensi juga menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja internal auditor pemerintah. Menurut [5], independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor internal . [6] [7]

Selain profesionalisme, dan independensi, pemahaman *good governance* juga berpengaruh terhadap kinerja auditor internal. Pemahaman *good governance* ini adalah bentuk penerimaan akan pentingnya peraturan tentang tata kelola pemerintahan yang baik yang mana dengan adanya aturan yang diterapkan dalam diri masing masing maka segala sesuatu akan lebih terarah dan tidak melanggar etika dalam melakukan suatu hubungan. Pemahaman *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik dan mengacu kepada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup [8]. Seorang auditor yang dapat memahami *good governance* dengan baik maka akan dapat mempengaruhi perilakunya dalam melaksanakan pekerjaan yang efektif dan efisien serta dapat mempengaruhi perilakunya dalam melaksanakan pekerjaannya dengan orientasi memperoleh hasil yang baik sehingga kinerjanya akan meningkat Kirana dan Suprasto (2019)

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan ini digunakan untuk mengatasi suatu masalah yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan yang timbul saat keinginan atau tujuan dari prinsipal dan agen berlawanan. Agen memiliki informasi lebih banyak daripada prinsipal karena agent terlibat langsung dalam pengelola. Adanya perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal menimbulkan permasalahan kesenjangan informasi yang tidak seimbang yang dikenal dengan asimetri informasi. Prinsipal menerima informasi yang tidak lengkap sehingga kinerja agen yang sebenarnya tidak terlihat. [10]

Untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan membuat laporan keuangan yang dibuat pejabat daerah lebih dapat dipercaya (reliabel), maka diperlukan pengujian oleh pihak independent yaitu auditor internal pemerintah. Teori keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami konflik kepentingan serta asimetri informasi yang muncul antara prinsipal dan agen serta mewujudkan kinerja auditor yang baik. Hal ini dapat terwujud apabila seorang auditor internal memiliki profesionalisme, independensi yang tinggi, dan pemahaman *good governance* yang baik untuk meningkatkan kinerja auditor internal tersebut serta dapat diharapkan tidak terjadi kecurangan dalam laporan keuangan.

2.2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Agar penyelenggaraan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang di harapkan, diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang baik pengawasan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal yang melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sedangkan yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara eksternal adalah Badan Pemeriklan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berjalan dengan baik dapat mencegah adanya kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor dalam memperbaiki pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan suatu daerah pada waktu yang

akan datang. APIP yang professional dan independent dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan kewajaran laporan keuangan. [11]

Menurut Asosiasi Auditor Intern Pemerintah (AAIPI) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang terdiri dari:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab kepada presiden
- b. Inspektorat Jenderal (Ipjen) / Inspektorat Utama (Ittama) / Inspektorat yang bertanggung jawab kepada Menteri / kepala Lembaga pemerintah non departemen (LPND)
- c. Inspektorat Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada gubernur
- d. Inspektorat pemerintah kabupaten / kota yang bertanggung jawab kepada bupati atau walikota

2.3. Kinerja Auditor

Kinerja adalah hasil yang diperoleh dari seorang karyawan dalam menjalankan pekerjaannya yang sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan pada diri karyawan tersebut dengan berdasar pada kualitas dan kuantitas yang dimilikinya [12]. Kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu [13].

kinerja auditor adalah akuntan publik yang melaksanakan penugasan pemeriksaan (examination) secara obyektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan [5] Kinerja auditor akan dilihat berdasarkan hasil dan proses audit yang dilakukannya sesuai dengan aturan dan standar yang ada.

Pengukuran kinerja auditor merupakan suatu proses pengukuran strategi kerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kinerja auditor adalah tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang diselesaikan oleh pihak auditor dalam waktu yang telah ditentukan [14]. Hal ini dapat berhubungan dengan kualitas kerja yang dapat dicapai serta kuantitas dapat berhubungan dengan kinerja yang dapat dicapai oleh auditor dalam waktu yang tertentu.

Indikator kinerja auditor merupakan ukuran tingkatan pencapaian sasaran dan tujuan dalam kinerja untuk mengukur suatu kegiatan yang telah ditentukan dengan memberikan elemen-elemen indikator kinerja untuk menilai kinerja auditor. Menurut Larkin dalam [15] terdapat empat dimensi personalitas untuk mengukur kinerja yaitu :

2.3.1. Faktor kemampuan (Ability)

Secara psikologis kemampuan (ability) terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge dan skill). Pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mencapai kinerja maksimal.

2.3.2. Komitmen Profesional

Auditor dengan komitmen professional yang kuat berdampak pada perilaku yang lebih mengarah kepada ketaatan aturan, dibandingkan dengan auditor yang komitmen profesionalnya rendah. Komitmen juga berkaitan dengan loyalitas dengan profesinya.

2.3.3. Faktor Motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja. Mereka yang bersikap positif (pro) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi dan sebaliknya jika mereka bersikap negatif (kontra) terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud adalah hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja, dan kondisi kerja.

2.3.4. Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja adalah sebagai tingkat kepuasan masing-masing auditor. Kepuasan kerja merupakan tingkat kepuasan individu dengan posisinya dalam organisasi tersebut.

2.4. Profesionalisme

Profesionalisme adalah sikap tanggung jawab dari seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya dengan keikhlasan hati sebagai seorang auditor dan tidak semata-mata melihat pekerjaan tersebut merupakan suatu profesi atau bukan [16]. Sedangkan profesionalisme menurut The Institute Of Internal Auditor (2017) yang terdapat pada Standard for Professional Practice of Internal Auditing merupakan panggilan atau pekerjaan yang membutuhkan pelatihan lanjutan dan biasanya melibatkan pekerjaan mental daripada pekerjaan manual. Pelatihan harus dilakukan untuk dapat berpraktik dalam profesinya. Profesi tersebut memberikan pelayanan yang berharga bagi masyarakat. Menurut Hall & Singleton, indikator profesionalisme ada 5 [17], yaitu:

2.4.1. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki.

2.4.2. Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

2.4.3. Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi).

2.4.4. Keyakinan terhadap keyakinan profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.

2.4.5. Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan

2.5. Independensi

Menurut *The Institute Of Internal Auditor* (2017) dalam *Standard for Professional Practice of Internal Auditing* [17] menyatakan bahwa independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas auditor internal untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak. Sedangkan menurut [5], independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Independensi pada seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor harus memiliki kejujuran dan keberanian serta tidak memihak kepada siapapun sehingga menghasilkan kinerja auditor internal yang baik dan berkualitas. Indikator independensi seorang auditor dapat dilihat sebagai berikut [19]:

- a. Hubungan dengan klien
- b. Independensi pelaporan
- c. Independensi pekerjaan

2.6. Pemahaman Good Governance

Good governance adalah sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut [8], *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan publik dan *economics governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Sehingga apabila seorang auditor dapat memahami *good governane* dengan baik maka dapat mempengaruhi perilakunya dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat memperoleh kinerja yang berkualitas dan kinerjanya akan meningkat.

Pemahaman good governance merupakan wujud respek terhadap sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan produktivitas usaha [9]. Pemahaman *good governance* merupakan wujud penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk

mengatur hubungan, fungsi, dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Pengimplementasian *good governance* akan mendorong auditor untuk melaksanakan pengauditan dengan baik sehingga tercapai pula kinerja yang cemerlang.

Indikator pemahaman *good governance* harus dianut dan dikembangkan dalam suatu praktek penyelenggaraan kinerja auditor internal pemerintah. Ada empat indikator pemahaman *good governance* sebagai berikut [20]:

2.6.1. Fairness (Kewajaran)

Akuntan publik dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, harus bersikap independen dan menegakkan keadilan terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun terhadap kepentingan akuntan publik itu sendiri.

2.6.2. Transparency (Keterbukaan Informasi)

Hendaknya berusaha untuk selalu transparansi terhadap informasi laporan keuangan klien yang di audit.

2.6.3. Accountability (Dapat Dipertanggung Jawabkan)

Menjelaskan peran dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan kedisiplinan dalam melengkapai pekerjaan dan juga pelaporan.

2.6.4. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Memastikan dipatuhinya prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berpedoman pada standar profesional akuntan publik selama menjalankan profesinya.

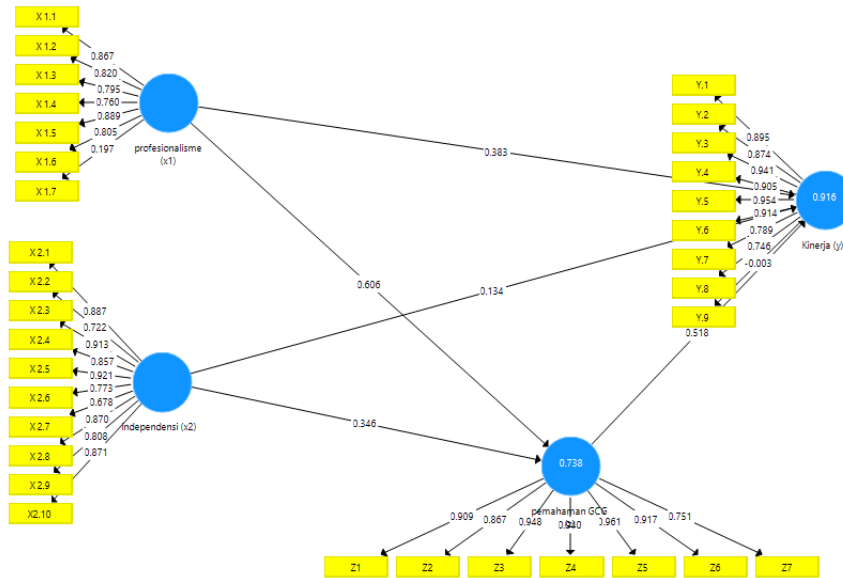
3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Provinsi Riau. Penelitian ini diarahkan pada Inspektorat Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau. Auditor disini merupakan seluruh aparat Inspektorat yang melaksanakan pemeriksaan keuangan di Inspektorat Provinsi Riau.. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel (*sampling*) adalah dengan menggunakan *non probability sampling* dengan teknik sampel jenuh (*sensus*) dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi (*sensus*) yaitu sebanyak 52 orang yang terdiri dari auditor madya, auditor muda, auditor pertama, auditor pelaksana lanjutan, dan auditor pelaksana. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Teknik pengujian instrumen dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan PLS (*Partial Least Square*) sebagai pengukurannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

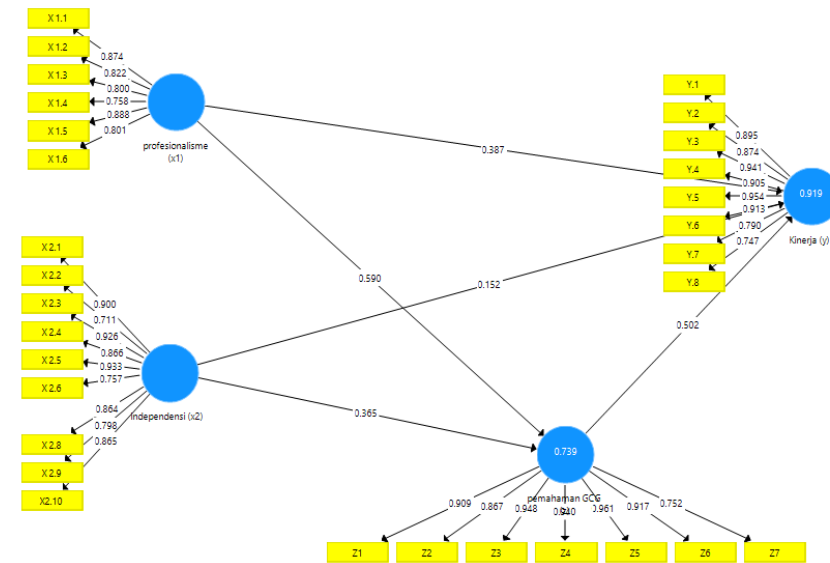
4.1. Uji Outer model

Outer model dinilai dengan cara melihat *convergent validity* (besarnya loading factor untuk masing-masing konstruk). *Convergent validity* dari model pengukuran dengan refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component score yang diestimasi dengan Software PLS. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang diukur [21]. Berikut gambar diagram Jalur *Outer model* dengan menggunakan Smart PLS.



Gambar 1. Outer model sebelum modifikasi
 Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2024

Dari diagram output pada figure 1 diperoleh *loading factor* dari masing masing hubungan antar indikator dengan konstraknya memiliki nilai yang bervariasi. Nilai *Outer model* atau korelasi antara konstruk dengan variabel pada awalnya belum memenuhi *convergen validity* karena masih ada indikator yang memiliki nilai *loading factor* di bawah 0,70. Modifikasi model dilakukan dengan mengeluarkan indikator-indikator yang memiliki nilai *loading factor* di bawah 0,70 [22]. Maka model akan diperbaharui kembali dan hasilnya seperti figure 2



Gambar 2 Outer model setelah modifikasi
 Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2024

4.1.1. Discriminant Validity

Discriminant validity dapat dievaluasi dengan melihat apakah indikator memiliki *loading* yang lebih tinggi terhadap konstraknya sendiri dibandingkan dengan konstruk lain [23].

Tabel 1. *Cross Loading*

	profesionalisme (x1)	independensi (x2)	pemahaman GCG (z)	Kinerja (y)
X 1.1	0.874	0.521	0.719	0.791
X 1.2	0.822	0.304	0.569	0.611

	profesionalisme (x1)	independensi (x2)	pemahaman GCG (z)	Kinerja (y)_
X 1.3	0.800	0.623	0.733	0.799
X 1.4	0.758	0.311	0.537	0.569
X 1.5	0.888	0.573	0.728	0.800
X 1.6	0.801	0.539	0.667	0.747
X 2.1	0.486	0.900	0.608	0.662
X 2.2	0.512	0.711	0.504	0.578
X 2.3	0.550	0.926	0.700	0.760
X 2.4	0.512	0.866	0.628	0.708
X 2.5	0.543	0.933	0.658	0.715
X 2.6	0.462	0.757	0.481	0.452
X 2.8	0.525	0.864	0.649	0.602
X 2.9	0.444	0.798	0.566	0.534
X2.10	0.526	0.865	0.652	0.605
Y.1	0.866	0.639	0.829	0.895
Y.2	0.829	0.633	0.808	0.874
Y.3	0.839	0.666	0.877	0.941
Y.4	0.811	0.640	0.850	0.905
Y.5	0.878	0.680	0.891	0.954
Y.6	0.820	0.634	0.844	0.913
Y.7	0.549	0.685	0.721	0.790
Y.8	0.558	0.689	0.656	0.747
Z1	0.775	0.642	0.909	0.821
Z2	0.726	0.611	0.867	0.765
Z3	0.773	0.674	0.948	0.888
Z4	0.751	0.667	0.940	0.876
Z5	0.808	0.708	0.961	0.893
Z6	0.748	0.663	0.917	0.850
Z7	0.476	0.551	0.752	0.725

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2024

4.1.2. Uji Reliabilitas

Uji reliability digunakan untuk mengukur hasil ukur yang stabil atau konstan, serta dapat diandalkan/reliabel. Terindikasi dari jawaban seorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari beberapa kali *test*, melalui metode *Internal consistency* melalui *fitur composite reliability* dan *koefisien cronbach's Alpha*

Tabel 2. Uji reliability

	Cronbach's Alpha	rho_A Composite Reliability		Average Variance Extracted (AVE)
profesionalisme (x1)	0.906	0.914	0.927	0.681
independensi (x2)	0.951	0.958	0.959	0.722
pemahaman GCG (z)	0.961	0.966	0.968	0.812
Kinerja (y)_	0.957	0.963	0.965	0.774

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2024

Kesimpulan atas pengolahan data menunjukkan angka yang memuaskan, kesemua variabel diatas ambang batas 0,70, menunjukkan konsistensi dan stabilitas instrumen yang digunakan tinggi. Disimpulkan semua konstruk penelitian ini sudah menjadi alat ukur yang fit, serta memiliki reliabilitas yang baik.

4.2. Uji Inner model

4.2.1. Analisis R Square

Analisis R Square bertujuan untuk mengetahui besarnya prosentase variabilitas konstruk endogen yang mungkin diterangkan oleh variabilitas konstruk eksogen. Analisis ini juga untuk mengetahui kebaikan model persamaan struktural. Semakin tinggi nilai *R-square* menunjukkan semakin besar variabel eksogen tersebut dapat menerangkan variabel endogen sehingga semakin baik persamaan strukturalnya. Terlampir nilai *output* nilai *R Square* sbb:

Tabel 3 Hasil Nilai *R Square*

	R Square	R Square Adjusted
pemahaman GCG (z)	0.739	0.729
Kinerja (y)	0.919	0.914

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2024

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa nilai R^2 variabel pemahaman *Good Governance* sebesar 0.739 yang berarti bahwa pemahaman *Good Governance* dipengaruhi oleh Variabel profesionalisme dan independensi sebesar 73,9% sedangkan sisanya 26,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian. Sedangkan Nilai R^2 variabel kinerja auditor internal sebesar 0,919 yang berarti Kinerja auditor internal (Y) dipengaruhi secara bersama-sama oleh variabel profesionalisme independensi dan variabel pemahaman *Good Governance* sebesar 91,9%, Sedangkan 8,1% sisanya, dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

4.2.2. Q-Square

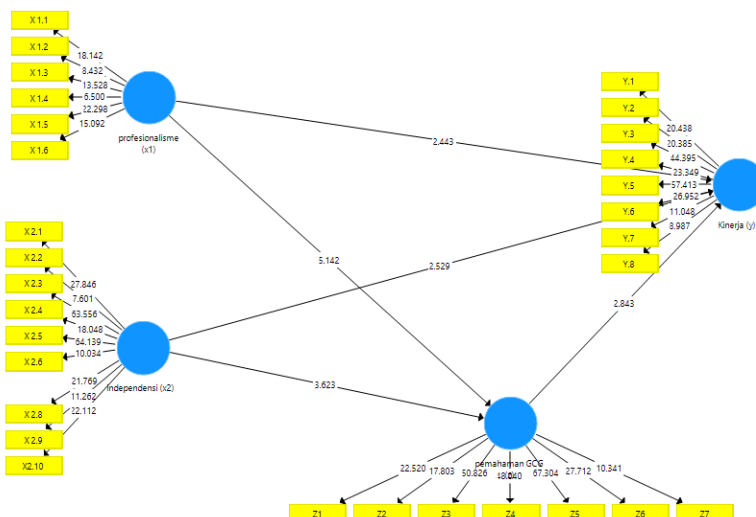
Penilaian *goodness of fit* diketahui dari nilai Q-Square. Nilai Q-Square memiliki arti yang sama dengan coefficient determination (R-Square) pada analisis regresi, dimana semakin tinggi Q-Square, maka model dapat dikatakan semakin baik atau semakin fit dengan data. Adapun hasil perhitungan nilai QSquare adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Q-Square} &= 1 - [(1 - R^2.1) \times (1 - R^2.2)] \\
 &= 1 - [(1 - 0,739) \times (1 - 0,919)] \\
 &= 1 - (0,261 \times 0,081) \\
 &= 1 - 0,021141 \\
 &= 0,9789
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai Q-Square sebesar 0,9789. Hal ini menunjukkan besarnya keragaman dari data penelitian yang dapat dijelaskan oleh model penelitian adalah sebesar 76,20%. Sedangkan sisanya sebesar 97,89% dijelaskan oleh faktor lain yang berada di luar model penelitian ini. Dengan demikian, dari hasil tersebut maka model penelitian ini dapat dinyatakan telah memiliki *goodness of fit* yang baik.

4.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis dilakukan berdasarkan hasil pengujian *Inner model* (model struktural) yang meliputi *output r-square*, koefisien parameter dan t-statistik. Untuk melihat apakah suatu hipotesis itu dapat diterima atau ditolak diantaranya dengan memperhatikan nilai signifikansi antar konstruk, t-statistik, dan p-values.



Gambar 3 Inner model

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2024

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *T-Statistics* dan nilai *P-Values*. Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila nilai *P-Values* < 0,05. Berikut adalah hasil uji hipotesis pengaruh langsung yang diperoleh dalam penelitian ini melalui *Inner model*:

Tabel 4 Uji Hipotesis Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
profesionalisme (x1) -> pemahaman GCG (z)	0.59	0.587	0.115	5.142	0.000
profesionalisme (x1) -> Kinerja (y)	0.387	0.372	0.158	2.443	0.015
independensi (x2) -> pemahaman GCG (z)	0.365	0.372	0.101	3.623	0.000
independensi (x2) -> Kinerja (y)	0.152	0.15	0.06	2.529	0.012
pemahaman GCG (z) -> Kinerja (y)	0.502	0.517	0.177	2.843	0.005

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2024

Tabel 5 Uji Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
profesionalisme (x1) -> pemahaman GCG (z) -> Kinerja (y)	0.297	0.311	0.143	2.077	0.039
independensi (x2) -> pemahaman GCG (z) -> Kinerja (y)	0.184	0.189	0.074	2.466	0.014

Sumber: Data diolah dengan SmartPLS, 2024

4.3.1. Hasil uji hipotesis pengaruh langsung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. **H₁: Profesionalisme berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau**

Pengaruh Profesionalisme (X1) terhadap Kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau (Y) dengan nilai tstatistic sebesar 2443 > 1,96. (ttabel) dengan p-value sebesar 0,015 > 0,05. Nilai koefisien pengaruh = 0,387 yang menunjukkan arah pengaruh positif sehingga dapat disimpulkan **Hipotesis**

pertama (H₁) diterima yang artinya Profesionalisme berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau

b. H₂ : profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemahaman mengenai Good Governance auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau

Pengaruh profesionalisme (X1) terhadap terhadap Pemahaman mengenai *Good Governance* auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau dengan nilai tstatistic sebesar $5,142 > 1,96$ (ttabel) dengan p-value sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien pengaruh = $0,590$ yang menunjukkan arah pengaruh positif sehingga dapat disimpulkan **Hipotesis kedua (H₂) diterima** yang artinya profesionalisme berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Pemahaman mengenai *Good Governance* auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau

c. H₃: Independensi berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau

Pengaruh independensi (X2) terhadap Kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau (Y) dengan nilai tstatistic sebesar $2,529 > 1,96$. (ttabel) dengan p-value sebesar $0,012 > 0,05$. Nilai koefisien pengaruh = $0,152$ yang menunjukkan arah pengaruh positif sehingga dapat disimpulkan **Hipotesis ketiga(H₃) diterima** yang artinya independensi berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau

d. H₄ : independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pemahaman mengenai Good Governance auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau

Pengaruh independensi terhadap terhadap Pemahaman mengenai *Good Governance* auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau dengan nilai tstatistic sebesar $3,623 > 1,96$ (ttabel) dengan p-value sebesar $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien pengaruh = $0,152$ yang menunjukkan arah pengaruh positif sehingga dapat disimpulkan **Hipotesis keempat (H₄) diterima** yang artinya profesionalisme berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Pemahaman mengenai *Good Governance* auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau

e. H₅: Pemahaman mengenai Good Governance berpengaruh positif terhadap Kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau

Pengaruh Pemahaman mengenai *Good Governance* terhadap Kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau (Y) dengan nilai tstatistic sebesar $2,843 > 1,96$. (ttabel) dengan p-value sebesar $0,012 > 0,05$. Nilai koefisien pengaruh = $0,005$ yang menunjukkan arah pengaruh positif sehingga dapat disimpulkan **Hipotesis kelima (H₅) diterima** yang artinya Pemahaman mengenai *Good Governance* berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau

4.3.2. Hasil uji hipotesis pengaruh tidak langsung dalam penelitian ini adalah:

a. H₆: Pemahaman mengenai Good Governance memediasi hubungan antara Profesionalisme terhadap Kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau

Pengaruh tidak langsung Profesionalisme (X1) terhadap Kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau dengan nilai tstatistic sebesar $2,077 > 1,96$. (ttabel) dengan p-value sebesar $0,039 > 0,05$. Nilai koefisien pengaruh = $0,297$ yang menunjukkan arah pengaruh positif sehingga dapat disimpulkan **Hipotesis keenam (H₆) diterima** yang artinya variabel *pemahaman mengenai good governance* memediasi hubungan antara Profesionalisme (X1) dengan Kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau

b. H₇: Pemahaman mengenai Good Governance memediasi hubungan antara Profesionalisme terhadap Kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau

Pengaruh tidak langsung independensi (X2) terhadap Kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau dengan nilai tstatistic sebesar $2,466 > 1,96$. (ttabel) dengan p-value sebesar $0,014 > 0,05$. Nilai koefisien pengaruh = $0,297$ yang menunjukkan arah pengaruh positif sehingga dapat disimpulkan **Hipotesis ketujuh (H₇) diterima** yang artinya variabel *pemahaman mengenai good governance* memediasi hubungan antara independensi (X2) dengan Kinerja auditor internal pada Inspektorat Provinsi Riau

4.4. Diskusi

4.4.1. Pengaruh Profesionalisme (X) Terhadap Kinerja auditor internal (Y)

Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap kinerja

auditor internal di Inspektorat Provinsi Riau. Sikap profesionalisme yang dimiliki oleh seorang auditor menjadi penting untuk diterapkan dalam melakukan suatu pemeriksaan, karena akan memberi pengaruh yang signifikan pada kualitas kinerja auditor internal. Harapan masyarakat terhadap tuntutan akuntabilitas dan transparansi akan terpenuhi apabila jika auditor dapat menjalankan sikap profesionalisme tersebut dengan baik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja auditor internal. Profesionalisme sangat penting untuk diterapkan dalam melakukan pemeriksaan oleh auditor untuk menunjang kinerja auditor agar semakin lebih baik lagi. Sehingga profesionalisme berpengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini sesuai dengan teori keagenan yang dimana jika auditor internal menerapkan sikap dan bekerja secara profesional dalam memahami konflik antara agent dan principal maka dapat mewujudkan kinerja auditor yang baik dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan tekun dan seksama, serta dalam menentukan keputusan tidak terpengaruh dari pihak lain. Keberadaan auditor yang memiliki sikap profesionalisme diharapkan dapat mempertimbangkan tingkat materialitas dalam laporan keuangan.

4.4.2. Pengaruh Profesionalisme (X) Terhadap Pemahaman mengenai Good Governance (Z)

Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa Profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap Pemahaman mengenai *Good Governance* auditor internal di Inspektorat Provinsi Riau. Profesionalisme auditor internal mencakup tingkat keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan etika kerja yang dimiliki dalam menjalankan tugas mereka. Auditor yang profesional memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran publik. Dengan profesionalisme yang tinggi, auditor internal dapat mengevaluasi dan menilai kebijakan serta praktik dalam organisasi secara objektif, memberikan rekomendasi perbaikan, dan memastikan bahwa tata kelola pemerintahan sesuai dengan standar yang baik. Selain itu, auditor yang profesional juga berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah karena mereka menjamin bahwa pengawasan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, hubungan antara profesionalisme auditor internal dan pemahaman tentang *good governance* sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik, khususnya dalam konteks pengawasan keuangan dan kebijakan di Inspektorat Provinsi Riau.

4.4.3. Pengaruh Independensi (X) Terhadap Kinerja auditor internal (Y)

Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa Independensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Provinsi Riau. Menurut [5], independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Seorang auditor yang dapat menegakkan independensinya akan menyadari bahwa hasil audit yang dikerjakan merupakan kepentingan umum, sehingga auditor harus jujur, netral, serta tidak terpengaruh oleh pihak luar. Tujuan auditor independen adalah untuk mendapatkan bukti kompeten yang cukup untuk memberikan basis yang memadai dalam merumuskan suatu pendapat.

Berdasarkan tujuan dari independensi itu sendiri, dapat disimpulkan adanya hubungan antara independensi auditor dengan kinerja, bahwa auditor yang memiliki independensi yang tinggi maka dia tidak akan mudah terpengaruh dan tidak mudah dikendalikan oleh pihak lain dalam mempertimbangkan suatu fakta yang dijumpai dalam pemeriksaan, dalam merumuskan serta menyatakan pendapatnya. Hal ini sejalan dengan teori keagenan yang dimana kepercayaan masyarakat umum sebagai principal atas sikap independensi pada auditor sangat berguna sehingga akan mempengaruhi tingkat pencapaian pelaksanaan suatu pekerjaan yang semakin baik atau dengan kata lain kinerja auditor akan menjadi lebih baik. Audit yang dilakukan oleh seorang auditor sangat diandalkan, untuk mendapat kepercayaan auditor memerlukan independensi untuk membuktikan kepada para pengguna laporan keuangan bahwa auditor tidak bersifat memihak atas tekanan pihak tertentu.

4.4.4. Pengaruh Independensi (X) Terhadap Pemahaman mengenai Good Governance (Z)

Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa Independensi berpengaruh signifikan terhadap Pemahaman mengenai *Good Governance* auditor internal di Inspektorat Provinsi Riau. Independensi auditor internal merujuk pada kemampuan mereka untuk menjalankan tugas pengawasan secara objektif, tanpa adanya pengaruh atau tekanan dari pihak manapun, baik itu dari pihak internal organisasi maupun eksternal. Dengan memiliki tingkat independensi yang tinggi, auditor internal dapat melakukan penilaian secara jujur dan bebas terhadap kebijakan, prosedur, serta praktik yang diterapkan dalam organisasi, memastikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas

diterapkan dengan baik. Sebaliknya, jika independensi auditor terganggu, kemungkinan besar pemahaman mereka tentang *good governance* akan terpengaruh, karena mereka mungkin tidak dapat memberikan penilaian yang objektif atau terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Oleh karena itu, independensi auditor internal sangat penting dalam memastikan bahwa pengawasan dan penilaian terhadap implementasi tata kelola pemerintahan dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan standar tata kelola yang baik, serta memberikan kontribusi positif bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Inspektorat Provinsi Riau.

4.4.5. Pengaruh pemahaman mengenai *good governance* Terhadap Kinerja auditor internal (Y)

Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa pemahaman mengenai *good governance* berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Kinerja auditor internal di Inspektorat Provinsi Riau. Auditor internal yang memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi, akan lebih mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pelaksanaan tugas pengawasan mereka. Pemahaman yang mendalam mengenai *good governance* memungkinkan auditor untuk melakukan penilaian yang lebih objektif dan tepat, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan tata kelola di organisasi. Selain itu, pemahaman yang baik tentang *good governance* juga mempengaruhi sikap profesional auditor dalam menjalankan tugasnya, yang pada gilirannya meningkatkan efektivitas dan kualitas pekerjaan mereka. Dengan demikian, semakin baik pemahaman auditor internal mengenai *good governance*, semakin tinggi kinerja mereka dalam menjalankan tugas pengawasan, yang berkontribusi pada perbaikan tata kelola pemerintahan di Inspektorat Provinsi Riau.

4.4.6. Pengaruh Profesionalisme Terhadap Kinerja auditor internal dengan di mediasi oleh pemahaman mengenai *good governance*

Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa pemahaman mengenai *good governance* mampu memediasi hubungan Profesionalisme terhadap Kinerja auditor internal di Inspektorat Provinsi Riau. Profesionalisme auditor internal, yang mencakup keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan etika kerja, memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja mereka. Namun, pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip *good governance* dapat bertindak sebagai mediator, memperkuat dampak positif dari profesionalisme terhadap kinerja auditor. Auditor yang profesional, dengan pemahaman yang mendalam tentang *good governance*, akan lebih mampu menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam tugas pengawasan mereka, sehingga menghasilkan penilaian yang lebih objektif, rekomendasi yang lebih tepat, dan pengawasan yang lebih efektif. Pemahaman yang baik mengenai *good governance* memastikan bahwa auditor internal tidak hanya mengandalkan keterampilan teknis mereka, tetapi juga memiliki panduan yang jelas tentang bagaimana menerapkan standar tata kelola yang baik

4.4.7. Pengaruh independensi Terhadap Kinerja auditor internal dengan di mediasi oleh pemahaman mengenai *good governance*

Berdasarkan pada hasil penelitian diketahui bahwa pemahaman mengenai *good governance* mampu memediasi hubungan independensi terhadap Kinerja auditor internal di Inspektorat Provinsi Riau. Independensi auditor internal, yang mengacu pada kemampuan mereka untuk menjalankan tugas pengawasan secara objektif dan tanpa pengaruh eksternal, memiliki dampak langsung terhadap kinerja mereka. Namun, pemahaman yang kuat mengenai prinsip-prinsip *good governance* berfungsi sebagai mediator yang memperkuat pengaruh independensi terhadap kinerja auditor. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan integritas, auditor internal dapat lebih efektif dalam melaksanakan tugas pengawasan dan memberikan penilaian yang objektif terhadap kebijakan serta praktik yang diterapkan dalam organisasi. Pemahaman mengenai *good governance* membantu auditor untuk menginterpretasikan data dan informasi secara lebih komprehensif, yang meningkatkan kualitas pengawasan mereka. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang *good governance* bukan hanya mendukung independensi auditor, tetapi juga memastikan bahwa independensi tersebut diterjemahkan menjadi kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan tugas pengawasan di Inspektorat Provinsi Riau.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara berbagai faktor terhadap kinerja auditor internal di Inspektorat Provinsi Riau. Profesionalisme terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja auditor internal, di mana sikap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemeriksaan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas kinerja auditor. Profesionalisme ini juga berhubungan erat dengan pemahaman yang lebih baik mengenai prinsip-prinsip *good governance*, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kinerja auditor internal. Hal

ini juga didukung oleh teori keagenan, yang menekankan pentingnya auditor untuk bekerja secara profesional dalam memahami hubungan antara agent dan principal, sehingga kinerja auditor dapat tercapai dengan baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, independensi auditor internal juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja mereka. Auditor yang memiliki independensi tinggi akan menjalankan tugas dengan objektivitas, tidak terpengaruh oleh pihak lain, dan mempertimbangkan fakta secara jujur. Keberadaan independensi ini membantu auditor untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam merumuskan pendapat dan memberikan hasil audit yang akurat serta dapat dipercaya. Teori keagenan juga menjelaskan bahwa kepercayaan publik terhadap independensi auditor memiliki dampak positif pada pencapaian kinerja auditor.

Pemahaman mengenai good governance, yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan integritas, terbukti menjadi mediator yang signifikan dalam memperkuat pengaruh profesionalisme dan independensi terhadap kinerja auditor internal. Auditor yang memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip good governance akan lebih efektif dalam menjalankan tugas pengawasan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif, serta meningkatkan kualitas pengawasan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, baik profesionalisme, independensi, maupun pemahaman mengenai good governance memiliki peran yang saling mendukung dalam meningkatkan kinerja auditor internal di Inspektorat Provinsi Riau.

Selain itu, Profesionalisme berpengaruh signifikan secara langsung terhadap *Intention to Stay* Karyawan dan Guru yang bekerja di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis Siak. Hal ini bermakna semakin baik Profesionalisme maka *Intention to Stay* Karyawan dan Guru yang bekerja di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis Siak akan semakin baik pula. Demikian pula sebaliknya semakin rendah Profesionalisme guru maka akan menurunkan *Intention to Stay* Karyawan dan Guru yang bekerja di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis Siak. Berdasarkan pada hasil penelitian juga diketahui *Intention to Stay* mampu memediasi hubungan antara pengembangan kairi terhadap Kinerja auditor internal Karyawan dan Guru yang bekerja di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis Siak. Hal ini bermakna semakin baik *Intention to Stay* maka akan mempengaruhi hubungan Profesionalisme dan Kinerja auditor internal Karyawan dan Guru yang bekerja di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis Siak

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Detik.com, "ICW Ungkap Ada 444 Kasus Korupsi di 2020, Kerugian Negara Rp 18,6 T.," 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5682891/icw-ungkap-ada-444-kasus-korupsi-di-2020-kerugian-negara-rp-186-t>
- [2] Sabangmeraukenews.com, "Dugaan Skandal Gratifikasi Tim Auditor Inspektorat Riau Merebak, Fitra Desak Aparat Hukum Bergerak.," 2022. <https://www.sabangmeraukenews.com/berita/4972/dugaan-skandal-gratifikasi-tim-auditor-inspektorat-riau-merebak-fitra-desak-aparat-hukum-bergerak.html>
- [3] Riauonline.com, "Fitra Beberkan Data LHP BPK: Rp 91 Miliar Lebih APBD Jadi Temuan BPK," 2021. <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2021/10/02/fitra-beberkan-data-lhp-bpk-rp-91-miliar-lebih-apbd-jadi-temuan-bpk>
- [4] M. Thoha, *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2019.
- [5] D. Mulyadi, *Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.
- [6] Marita and Y. P. S. Gultom, "Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Independensi, Motivasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi Kasus Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iv Medan)," *J. Akunt.*, vol. 3, no. 1, p. 645, 2018, doi: 10.30736/jpensi.v3i1.131.
- [7] Viera et al, "The Effect of Time Budget Pressure , Work Stress , and Independence on Auditor Performance," *J. Int. Conf. Proc.*, vol. 4, no. 3, pp. 69–80, 2021.
- [8] M. Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI, 2018.
- [9] I. B. W. Kirana and B. Suprasto, "Pengaruh Independensi Auditor, Pemahaman Good Governance dan Self Efficacy Terhadap Kinerja Auditor Pada KAP Bali," *E-Jurnal Akunt.*, vol. 27, p. 1839, 2019, doi: 10.24843/eja.2019.v27.i03.p08.
- [10] R. Hendrastuti and R. F. Harahap, "Agency theory: Review of the theory and current research," *J. Akunt. Aktual*, vol. 10, no. 1, p. 85, 2023, doi: 10.17977/um004v10i12023p085.
- [11] S. W. Zanra, A. R. Tanjung, and A. Silfi, "The Effect Of Good Corporate Governance Mechanism, Company Size, Leverage And Profitability For Carbon Emission Disclosure With Environment

- Performance As Moderating Variables,” *Bilancia J. Ilm. Akunt.*, vol. 4, no. 2, pp. 148–164, 2020, [Online]. Available: <http://www.ejournal.pelitaIndonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>
- [12] A. A. A. P. Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2019.
- [13] I. Fahmi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [14] N. I. B. S. Adhi: and R. I. Wayan, “PENGARUH PROFESIONALISME, ETIKA PROFESI DAN PELATIHAN AUDITOR TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI BALI Ida,” *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 13, no. 3, pp. 916–943, 2015.
- [15] N. S. Amalia, I. Indarti, and Z. Zaharman, “Pengaruh Profesionalisme, Independensi, Kompetensi, Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Internal Auditor Di Bpkp Provinsi Riau,” *J. Akunt. Kompetif*, vol. 6, no. 2, pp. 284–292, 2023, doi: 10.35446/akuntansikompetif.v6i2.1340.
- [16] K. M. D. Putri and I. D. . D. Suputra, “Pengaruh independensi, profesionalisme, dan etika profesi terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di Bali,” *E-Jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 4, no. 1, pp. 39–53, 2013.
- [17] S. . Tunnisa, “Pengaruh Independensi, Profesionalisme, Etika Profesi, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru),” 2020.
- [18] The Institute Of Internal Auditor and guidance, “International professional practice framework (IPPF),” *Greenwood Blvd, Suite 401 Lake Mary, FL 32746 USA*, 2017.
- [19] R. . Sari, “Pengaruh Independensi, Objektivitas Dan Audit Fee terhadap kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi,” UIN Malang, 2019.
- [20] M. Agustiningasih, “PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN, PENDIDIKAN BERKELANJUTAN, ETIKA PROFESI, BUDAYA ORGANISASI DAN PEMAHAMAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP HASIL KINERJA AUDITOR PEMERINTAH (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa Keuangan/ BPK-RI Perwakilan Provinsi Riau),” *JOM Fekon*, vol. 4, no. 1, 2017.
- [21] I. Ghozali, *Mediasi dan moderasi dalam analisis statistik : menggunakan program ibm spss 25,process versi 3.1 dan warppls 6.0*, 1st ed. Semarang: Yoga Pratama, 2019.
- [22] W. Abdillah, J. Hartono, and B. Usman, *Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis*, 2nd ed. UPP STIM YKPN - Yogyakarta, 2020.
- [23] Andreas Wijaya, *Metode Penelitian Menggunakan Smart Pls 03*. Yogyakarta: Innosain, 2019.